

**PENGARUH DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN BELANJA
MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA 10
PROVINSI DI PULAU SUMATERA TAHUN 2011-2024**



Skripsi Oleh :

John Moses Manik

01021282126064

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**“PENGARUH DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN
BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
PADA 10 PROVINSI DI PULAU SUMATERA TAHUN 2011-2024”**

Disusun oleh,

Nama : John Moses Manik
NIM : 01021282126064
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING



Tanggal 22 Mei 2025

Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

“PENGARUH DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA 10 PROVINSI DI PULAU SUMATERA TAHUN 2011-2024”

Disusun oleh,

Nama : John Moses Manik
NIM : 01021282126064
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 16 Juni 2025 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Indralaya, 26 Juni 2025

Pembimbing,

Penguji,



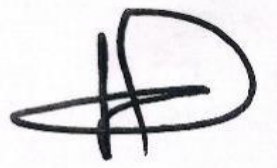
Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, S.E., M.Si
NIP. 196007101987031003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : John Moses Manik

NIM : 01021282126064

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

**PENGARUH DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN
BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
PADA 10 PROVINSI DI PULAU SUMATERA TAHUN 2011-2024**

Pembimbing : Feny Marissa, S.E., M.Si

Tanggal Ujian : 16 Juni 2025

Adalah benar hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 21 Juli 2025

Pembuat Pernyataan

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 21-7-2025
FAKULTAS EKONOMI UNSRI



John Moses Manik

NIM. 01021282126064

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. (Yakobus 1:12)

Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana.

(Amsal 19 : 21)

Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun. (Ulangan 28 : 13)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Juru Selamat Yesus Kristus**
- **Bapak dan Mama**
- **Keluarga Besar**
- **Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2011-2024”. Tujuan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera. Penulis merasa bahwa dalam menyusun laporan ini masih menemui beberapa kesulitan dan hambatan, namun kesulitan dan hambatan tersebut dapat diatasi berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Semoga karya ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis, tetapi juga masyarakat luas serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Penulis percaya bahwa setiap proses, betapapun sulitnya, adalah bagian dari perjalanan menuju pencapaian yang lebih baik. Jangan pernah takut untuk melangkah, karena setiap langkah kecil hari ini adalah pondasi bagi kesuksesan di masa depan.

Indralaya, 21 Juli 2025



John Moses Manik

NIM. 01021282126064

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat-Nya yang telah memberikan penulis kekuatan, kesabaran, kesehatan, dan kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini. Ucapan syukur tak terkira diucapkan penulis melalui doa yang telah dikabulkan-Nya.
2. Alm Bapak dan Ibu saya yang hebat, Lidarman Manik dan Anita Vera Sihombing yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, semangat, tidak pernah lelah bekerja dan memberikan dukungan yang sebesar-besarnya serta doa demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Kedua saudara kandung yang saya sayangi Barnabas Manik dan Abraham Manik yang telah memberikan perhatian, semangat, dan motivasi serta selalu mendengarkan cerita penulis dalam proses mengerjakan skripsi.
4. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Feny Marissa, S.E., M.Si yang telah bersedia memberikan waktu dan tenaga untuk bimbingan yang berharga dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Dosen Penguji Skripsi, Bapak Prof. Dr. H. Didik Susetyo, S.E., M.Si yang telah memberikan kritik dan saran pada skripsi penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, juga senantiasa membantu dan memberi motivasi dan arahan pada berbagai kebutuhan akademik selama di masa perkuliahan.
6. Group Golden Hill (Helios, Salman, Ronaldo, Ranap, Samuel, Kevin, Irham dan Sulistio) teman seperjuangan, yang telah memberikan cerita indah, memberi warna dalam perkuliahan penulis dari mahasiswa baru sampai proses skripsian, selalu memberikan dukungan dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Group Bedeng Damaris yang telah banyak membantu penulis, memberikan motivasi, semangat, memberikan cerita yang mengesankan selama merantau dan mendengarkan cerita penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Sektor Gang Buntu (PDO Immanuel) yang telah menjadi rumah pertama selama di perantauan. Orang-orang yang pertama kali dikenal selama menginjakkan kaki di bumi sriwijaya. Terimakasih atas kenangan, suka dan duka serta pengalaman yang bermakna selama di perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
10. Seluruh staf dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya.

11. Teman-teman sebangkungan, yang telah membantu dan memberikan semangat dalam proses penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa dituliskan oleh penulis. Terimakasih atas doa, motivasi serta dukungannya.
13. Untuk diri saya sendiri, terimakasih telah bertahan dengan gigih dan mengatasi setiap rintangan dan terimakasih karena tidak patah semangat serta selalu percaya pada diri sendiri dalam proses pengerjaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi bagi pembaca untuk menemukan penelitian yang baru dan inovatif.

Indralaya, 21 Juli 2025



John Moses Manik
NIM. 01021282126064

ABSTRAK

PENGARUH DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA 10 PROVINSI DI PULAU SUMATERA TAHUN 2011-2024

Oleh:

John Moses Manik ; Feny Marissa

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk menggambarkan kualitas hidup masyarakat melalui aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, pemerintah daerah memanfaatkan berbagai sumber pendanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 10 provinsi di Pulau Sumatera menggunakan data tahunan periode 2011-2024. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi data panel menggunakan *fixed effect model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IPM di 10 provinsi di Pulau Sumatera. Secara parsial, Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh negatif dan Dana Alokasi Umum serta Belanja Modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan dana transfer dan belanja modal yang efektif dalam mendukung pembangunan manusia di tingkat daerah. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, khususnya dalam penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal, guna mendorong pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia dan mengurangi kesenjangan antar provinsi di Pulau Sumatera.

Kata Kunci : *Indeks Pembangunan Manusia, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pulau Sumatera*

Mengetahui,

Pembimbing

Ketua Jurusan Ekonomi

Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M. Si
NIP. 197304062010121001



Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001

ABSTRACT

THE EFFECT OF PROFIT SHARING FUNDS, GENERAL ALLOCATION FUNDS, AND CAPITAL EXPENDITURE ON THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN 10 PROVINCES IN SUMATERA ISLAND 2011-2024

By :

John Moses Manik ; Feny Marissa

Human development is one of the main indicators in assessing the success of a region's development. The Human Development Index is used to describe the quality of people's lives through aspects of education, health, and income. In an effort to improve the Human Development Index, local governments utilize various funding sources. This study aims to analyze the effect of Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds, and Capital Expenditures on the Human Development Index in 10 provinces on the island of Sumatra using annual data for the period 2011-2024. The analytical method used is a panel data regression method with a fixed effect model. The results show that Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds, and Capital Expenditures collectively have a significant effect on the Human Development Index in 10 provinces on the island of Sumatra. Partially, Revenue Sharing Funds have a negative effect, while General Allocation Funds and Capital Expenditures have a positive and significant effect on the Human Development Index. These findings emphasize the importance of effective management of fund transfers and capital expenditures in supporting human development at the regional level. This study recommends that local governments improve the quality of budget planning and implementation, particularly in the use of Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds, and Capital Expenditures, to encourage growth in the Human Development Index and reduce disparities between provinces on the island of Sumatra.

Keyword : Human Development Index, And Revenue Sharing, General Allocation Fund, Capital Expenditure, Sumatra Island

Acknowledge

*Head of The Department of
Development Economics*

Supervisor



Dr. Mukhlis, S.E., M. Si
NIP. 197304062010121001



Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa :

Nama : John Moses Manik

NIM 01021282126064

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Mata Kuliah : Keuangan Daerah

Judul Skripsi : Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 10 Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2011-2024

Telah kami periksa penulisan, grammar, maupun susunan tensesnya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar asbtrak.

Indralaya, 15 Juli 2025

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M. Si
NIP. 197304062010121001

Pembimbing,



Feny Marissa, S.E., M. Si
NIP. 199004072018032001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : John Moses Manik
Jenis Kelamin : Laki-laki
TTL : Jambi, 25 Mei 2003
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Kel. Lingkar selatan
Kec. Paal Merah, Kota Jambi
Email : johnmosesmanik@gmail.com

Pendidikan Formal

2009 - 2015 : SD Xaverius 2 Kota Jambi
2015 – 2019 : SMP Xaverius 1 Kota Jambi
2019 – 2021 : SMAN 8 Kota Jambi
2021 – 2025 : S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas
Ekonomi Universitas Sriwijaya

Pengalaman Organisasi

1. Staff Muda Divisi Internal HIMAJA 2021-2022

Pengalaman Magang

-

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
ABSTRACK	x
<i>ABSTRACK</i>	xi
SURAT PERNYATAAN ABSTRACK	xii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	13
2.1 Landasan Teori dan Konseptual.....	13
2.1.1 Teori <i>Human Capital</i>	15
2.1.2 Teori Kesejahteraan Masyarakat.....	18
2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia	20
2.1.4 Dana Bagi Hasil	23

2.1.5 Dana Alokasi Umum.....	24
2.1.6 Belanja Modal	26
2.2 Penelitian Terdahulu.....	28
2.3 Kerangka Pemikiran	29
2.4 Hubungan Antar Variabel.....	29
2.4.1 Hubungan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia	29
2.4.2 Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	30
2.4.3 Hubungan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia	31
2.5 Hipotesis Penelitian.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	33
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.4 Teknik Analisis Data	34
3.4.1 Analisis Regresi Data Panel	34
3.4.2 Metode Estimasi Model Regresi Data Panel	36
3.4.2.1 Common Effect Model (CEM)	36
3.4.2.2 Fixed Effect Model (FEM)	36
3.4.2.3 Random Effect Model (REM)	37
3.4.3 Uji Kesesuaian Model	37
3.4.3.1 Uji Chow.....	37
3.4.3.2 Uji Hausman	38
3.4.3.3 Uji Lagrange Multiplier	38
3.4.4 Uji Asumsi Klasik	39
3.4.4.1 Uji Heteroskedastisitas.....	39
3.4.4.2 Uji Multikolinearitas.....	39
3.4.5 Uji Estimasi Statistik.....	40
3.4.5.1 Uji Signifikansi Serempak (Uji F)	40

3.4.5.2 Uji Signifikansi Individu (Uji t).....	41
3.4.5.3 Koefisien Detrminasi (R ²).....	41
3.5 Definisi Operasional.....	42
3.5.1 Dana Bagi Hasil	42
3.5.2 Dana Alokasi Umum.....	42
3.5.3 Belanja Modal.....	43
3.5.4 Indeks Pembangunan Manusia	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Gambaran Umum	44
4.1.1 Kondisi 10 Provinsi Pulau Sumatera	44
4.1.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera	46
4.1.3 Perkembangan Dana Bagi Hasil pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera	48
4.1.4 Perkembangan Dana Alokasi Umum pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera	51
4.1.5 Perkembangan Belanja Modal pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera	53
4.2 Hasil dan Analisis Penelitian.....	55
4.2.1 Pemilihan Kesesuaian Model.....	55
4.2.1.1 Uji Chow	56
4.2.1.2 Uji Hausman	56
4.2.2 Hasil Uji Pemilihan Model	57
4.2.3 Probabilitas Provinsi di Pulau Sumatera.....	59
4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	65
4.2.4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	66
4.2.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas	67
4.2.5 Uji Uji Statistik	68
4.2.5.1 Uji F	68
4.2.5.2 Uji-t.....	69
4.2.5.3 Koefisien Determinasi (R ²).....	70

4.3 Pembahasan.....	71
4.3.1 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera	71
4.3.2 Pngaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera.....	73
4.3.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia. pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera	75
BAB V PENUTUP.....	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020-2024 (Indeks).....	5
Gambar 1.2 Dana Bagi Hasil pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020-2024 (Miliar Rp)	6
Gambar 1.3 Dana Alokasi Umum pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020-2024 (Miliar Rp)	7
Gambar 1.4 Belanja Modal pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020-2024 (Miliar Rp)	8
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 4.1 Peta Pulau Sumatera	45
Gambar 4.2 Residual Uji Heteroskedastisitas.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Indeks Pembangunan Manusia di di Pulau Sumatera Tahun 2011-2024 (Indeks)	47
Tabel 4.2 Dana Bagi Hasil di Pulau Sumatera Tahun 2011-2024 (Miliar Rp)	49
Tabel 4.3 Dana Alokasi Umum di Pulau Sumatera Tahun 2011-2024 (Miliar Rp)	52
Tabel 4.4 Belanja Modal di Pulau Sumatera Tahun 2011-2024 (Miliar Rp)	54
Tabel 4.5 Hasil Estimasi Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model	55
Tabel 4.6 Hasil Uji Chow	56
Tabel 4.7 Hasil Uji Hausman	57
Tabel 4.8 Hasil Estimasi Fixed Effect Model	59
Tabel 4.9 Intersep 10 Provinsi di Pulau Sumatera	66
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedtistas	
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas.....	67
Tabel 4.12 Hasil Uji F	68
Tabel 4.13 Hasil Uji-t.....	69
Tabel 4.14 Koefisien Determinasi (Adjusted R2).....	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Indeks Pembangunan Manusia	86
Lampiran 2 Data Dana Bagi Hasil	86
Lampiran 3 Data Dana Aloaksi Umum.....	87
Lampiran 4 Data Belanja Modal.....	87
Lampiran 5 Uji Statistik Deskriptif	88
Lampiran 6 Hasil Model Regresi pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera.....	88
Lampiran 7 Uji Chow	90
Lampiran 8 Uji Hausman.....	90
Lampiran 9 Uji Heteroskedastisitas.....	91
Lampiran 10 Uji Multikolinearitas	91
Lampiran 11 Uji Multikonearitas.....	92

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi menjadi langkah penting yang harus dilakukan oleh suatu negara untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai usaha yang direncanakan secara sistematis oleh suatu bangsa memaksimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki demi mencapai kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Kesejahteraan menjadi ukuran penting dalam menilai kondisi individu maupun kelompok masyarakat, apakah mereka telah mencapai kehidupan yang layak. Kondisi kesejahteraan dapat terlihat dari berbagai faktor, seperti kesehatan yang terjaga, peningkatan ekonomi, akses pendidikan yang baik, serta kualitas hidup yang memadai. Selain itu, pencapaian kesejahteraan masyarakat juga menjadi salah satu tujuan utama dari *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang mencerminkan keberhasilan suatu negara dalam membangun perekonomiannya secara berkelanjutan (Sultan, 2023).

Penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi aspek penting dalam mengukur kemajuan suatu daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator ideal, karena mengkombinasikan aspek kesejahteraan antara lain, pendidikan, kesehatan (harapan hidup) dan pendapatan. Pada tahun 1990, UNDP (*United Nations Development Programme*) memperkenalkan konsep

“Pembangunan Manusia” dalam laporan berjudul *Global Human Development Report* sebagai paradigma baru dalam model pembangunan. IPM mengintegrasikan angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan dengan daya beli, sehingga mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai peluang pembangunan secara menyeluruh (Rochdi, 2021). IPM lebih menekankan pentingnya pembangunan manusia yang berpusat pada peningkatan kapabilitas dan pemberdayaan masyarakat bukan sekadar pertumbuhan ekonomi semata. Oleh sebab itu, IPM menjadi indikator yang relevan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, serta menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata dan merata di berbagai daerah.

Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas IPM sebagai ukuran kualitas kesejahteraan, merupakan upaya strategis, dalam rangka pembangunan ekonomi daerah. Untuk mendukung pemerataan pembangunan pemerintah menyediakan sumber dana guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kedua undang-undang tersebut dirancang untuk memastikan distribusi dana secara proporsional sesuai kebutuhan daerah serta menjaga keseimbangan fiskal demi mendukung pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat.

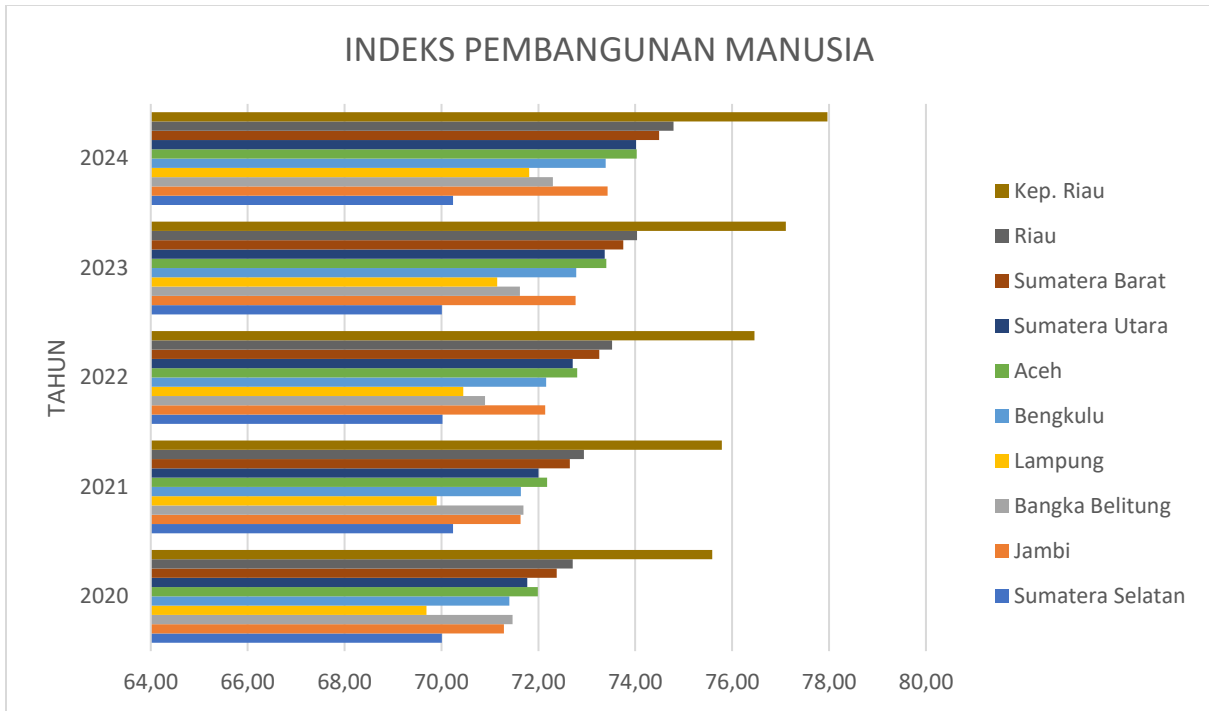
Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu dari dana perimbangan memiliki peran penting dalam mendukung IPM di daerah, karena dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan daerah berdasarkan kontribusi daerah terhadap pendapatan nasional. Melalui alokasi DBH yang bersumber dari pendapatan APBN, baik dari pajak maupun sumber daya alam digunakan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang secara langsung mempengaruhi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, peningkatan DBH berfungsi sebagai salah satu alat untuk mengurangi ketidakseimbangan fiskal antara pusat dan daerah serta mendukung upaya peningkatan IPM di seluruh wilayah Indonesia (Dewi, 2021). Sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Hanatjoko (2022) dan Yovita (2024) menunjukkan DBH memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Faktor pendukung lainnya dari dana perimbangan untuk mendorong peningkatan IPM yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah, sehingga dapat memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional dan pembangunan. Peningkatan DAU yang diberikan kepada daerah dapat memperbesar peluang bagi daerah tersebut untuk melakukan pembangunan. Namun, apabila tidak terdapat pengelolaan yang tepat hal ini tidak membuat tingkat kemajuan dan kesejahteraan di setiap daerah menjadi setara. Daerah-daerah yang masih tertinggal dan miskin tetap kesulitan untuk menyusul ketertinggalannya dari daerah-daerah yang sudah lebih berkembang (Susetyo, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Gulo (2023) dan

Puspitasari (2022) menunjukkan DAU memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM .

Selain itu terdapat salah satu pengeluaran pemerintah yang dapat meningkatkan IPM yaitu Belanja Modal. Kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk belanja modal dalam APBD diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang bertujuan untuk menambah aset atau kekayaan daerah. Ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan serta memperbaiki layanan kepada masyarakat dengan menyediakan fasilitas yang terkait langsung dengan pelayanan publik (Setiawan, 2022). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tumbuan (2023) dan Hananthoko (2020) menunjukkan Belanja Modal berpengaruh yang signifikan terhadap IPM.

Pulau Sumatera terdiri dari 10 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan potensi besar dalam menunjang perekonomian nasional. Namun masih terdapat menghadapi tantangan dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai faktor utama dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut ini adalah data dan analisis IPM Pulau Sumatera sebagai bagian dari gambaran kondisi pembangunan saat ini.

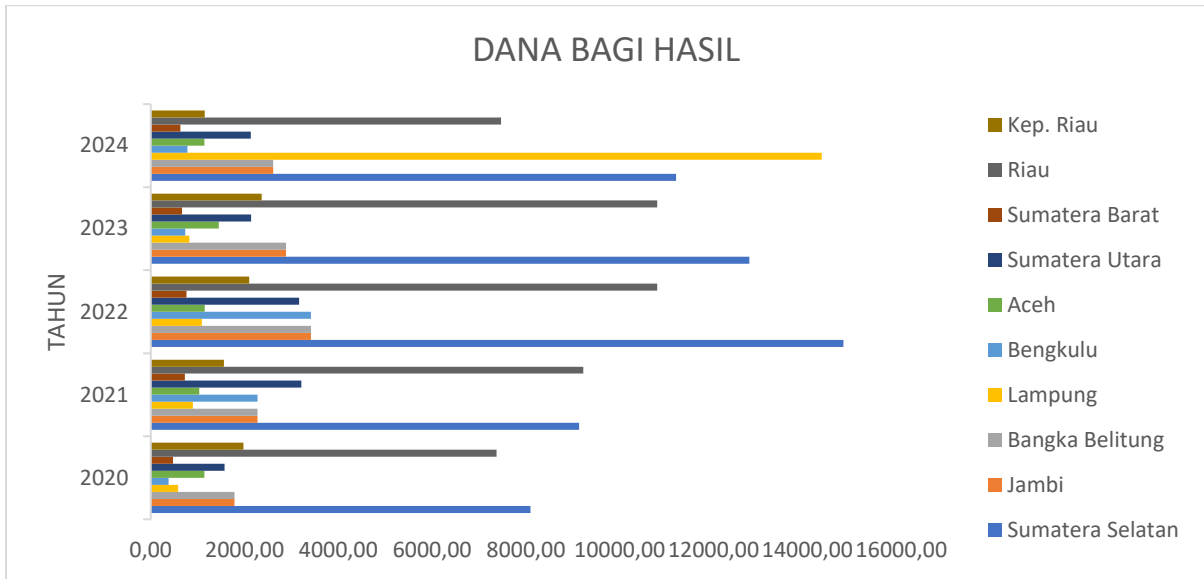


Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020-2024 (Indeks)

Sumber : BPS Indonesia 2024

Berdasarkan data Gambar 1.1 tersebut perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 10 Provinsi Pulau Sumatera menunjukkan Provinsi Kep. Riau mencatat sebagai IPM tertinggi dan pertumbuhan signifikan dari 75,59 indeks hingga ke 77,97 indeks menandakan keberhasilan pembangunan manusia yang terencana dan berkelanjutan. Tetapi terdapat Provinsi Lampung memiliki IPM terendah yaitu 69,69 indeks pada tahun 2020 dan kenaikan setiap tahunnya yang tidak terlalu signifikan menunjukkan terdapat kendala dalam peningkatan kualitas hidup. Perbedaan laju pertumbuhan IPM ini menunjukkan pada setiap provinsi

memiliki keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, infrastruktur yang kurang memadai, serta tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

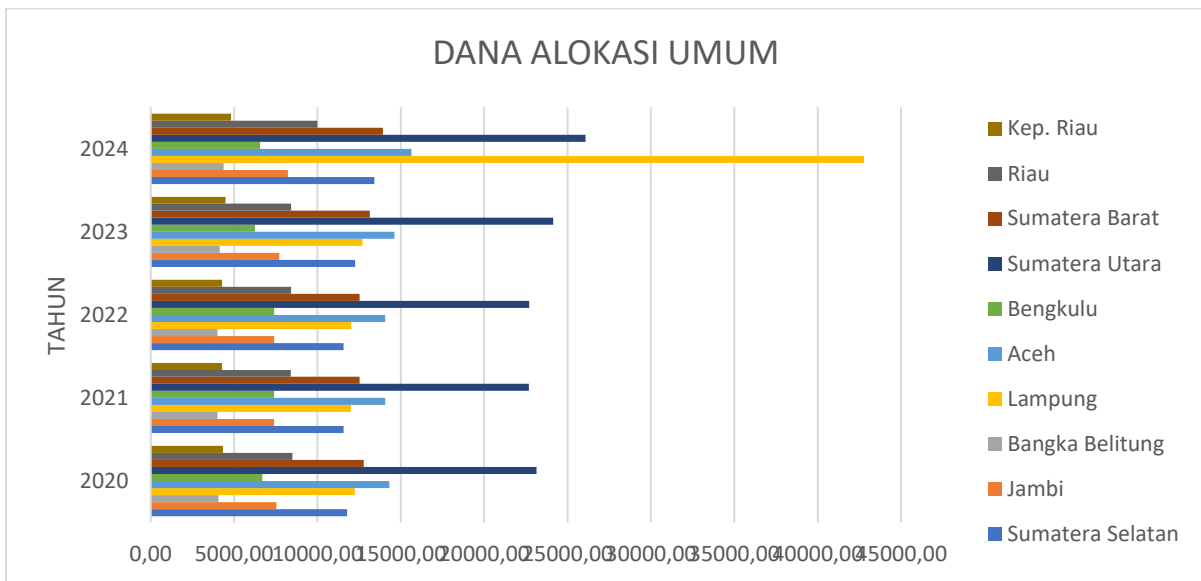


Gambar 1.2 Dana Bagi Hasil pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020-2024 (Miliar Rp)

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

Berdasarkan data Gambar 1.2 menunjukkan menunjukkan fluktuasi signifikan antar provinsi. Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan DBH tertinggi pada tahun 2022 yaitu 14.769,18 miliar. Hal ini terdapat terjadi karena penerimaan DBH dari sektor pertambangan umum dan kehutanan Prov. Sumatera Selatan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Provinsi Lampung mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2024, tetapi terdapat perbedaan yang drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun begitu provinsi lain terdapat sensitivitas terhadap perubahan ekonomi regional dan kebijakan fiskal. Penurunan signifikan terlihat di Provinsi Riau dan Provinsi Kep. Riau pada

tahun 2024, mengindikasikan potensi perubahan dalam kontribusi sektor penghasil DBH utama atau perubahan kebijakan transfer fiskal serta dinamika ekonomi yang menunjukkan berpengaruh pendapatan daerah dan dapat berlangsung bertahun-tahun kedepannya.

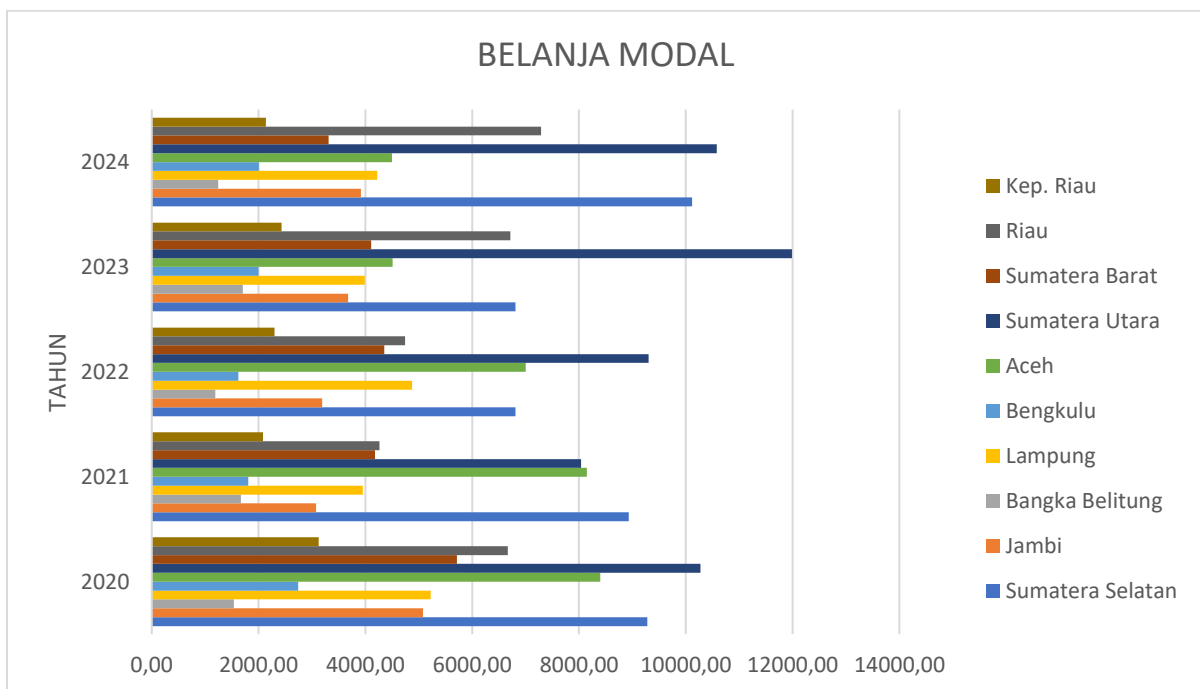


Gambar 1.3 Dana Alokasi Umum pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020-2024 (Miliar Rp)

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

Berdasarkan data Gambar 1.3 berikut menunjukkan perbedaan signifikan pada alokasi DAU untuk Provinsi Lampung pada tahun 2024 yaitu sebesar 427.699,30 miliar yang meningkat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, serta perbedaan yang sangat jelas dengan provinsi lain yang cenderung berubah-ubah tetapi terkendali. Provinsi Sumatera Selatan sebagai penerima DAU terbesar, menunjukkan tren penurunan sejak 2022 yang menunjukkan terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi DAU secara nasional. Hal dapat terjadi

karena adanya kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah Pusat sehingga terdapat pemangkasan anggaran dengan keluarnya Surat Keputusan Nomor 29 Tahun 2025 yang mengatur pengurangan dana transfer ke daerah, seperti Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan sekitar 69,6 miliar. Pemangkasan ini juga terjadi di kabupaten/kota di wilayah tersebut, dengan variasi pemotongan yang cukup signifikan seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mengalami pengurangan terbesar sekitar 108,7 miliar dan Kota Bukittinggi hanya mengalami pengurangan sekitar 3,6 miliar. Hal pendukung lainnya dipengaruhi oleh jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemiskinan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah.



Gambar 1.4 Belanja Modal pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020-2024 (Miliar Rp)

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

Berdasarkan data Gambar 1.4 berikut menunjukkan perbedaan Belanja Modal antar provinsi, dengan Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai Belanja Modal tertinggi yaitu 10.580,23 miliar secara keseluruhan. Provinsi Aceh mengalami penurunan terus menerus, sementara itu Provinsi Jambi mencatatkan nilai Belanja Modal yang terendah dengan peningkatan tidak stabil yang berbeda-beda di setiap tahunnya. Perbedaan ini dapat terjadi disebabkan oleh kapasitas fiskal, prioritas pembangunan, dan efektivitas pelaksanaan anggaran di masing-masing daerah. Seperti di Sumatera Selatan, alokasi belanja modal rata-rata masih di bawah 40%, dengan beberapa daerah seperti Musi Rawas Utara mencapai hampir 38,5%, sementara provinsi secara keseluruhan hanya sekitar 10,64%, akibat kendala teknis dan administratif dalam penyerapan anggaran. Di sisi lain, provinsi dengan PAD lebih besar dan fokus pembangunan infrastruktur yang kuat, seperti Sumatera Utara, mampu merealisasikan belanja modal lebih tinggi.

Penelitian yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal masih menimbulkan perdebatan di ranah penelitian empiris karena adanya hasil yang saling bertentangan. Temuan-temuan dari penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal memiliki dampak yang beragam terhadap Indeks Pembangunan Manusia serta pembangunan ekonomi di beberapa provinsi. Kondisi perekonomian beberapa wilayah provinsi di Indonesia tidak selalu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan Rian (2021), Gede (2022) dan Puspitasari (2022) menemukan bahwa DBH tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM serta Farhat (2023) dan Saragih (2020)

menemukan bahwa DAU tidak memberikan pengaruh positif yang signifikan begitu juga dengan Komariah *et al.* (2019) dan Prihastuti (2020) menarik kesimpulan bahwa belanja modal tidak memiliki efek signifikan pada IPM dan bahkan berefek negatif. Hal tersebut menandakan adanya masalah yang tidak diinginkan oleh masyarakat ataupun pemerintah telah terjadi.

Berdasarkan data dan fenomena yang sudah diuraikan diatas menarik minat penulis untuk melakukan penelitian secara statistik apakah variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia maka perlu dibuktikan suatu penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi “Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut muncul pertanyaan penelitian yang dapat di teliti lebih dalam lagi, yaitu Bagaimana Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pemahaman terkait keuangan daerah khususnya dalam menganalisis pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia pada 10 provinsi di pulau sumatera.
- b. Sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat menyumbangkan suatu karya yang mendukung pengelolaan anggaran pemerintah khususnya transfer pemerintah pusat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Peneliti mengharapakan agar studi ini bisa memberikan manfaat untuk sejumlah pihak, yaitu:

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam memahami bagaimana pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia pada 10 provinsi di pulau sumatera.
- b. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.

c. Bagi Penelitian berikutnya, sebagai bahan referensi dan data tambahan terkait pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Devi Utami Rika Safitri, & Widarjono, A. (2023). Analisis efisiensi pengelolaan Dana Alokasi Umum Kabupaten atau Kota di Pulau Kalimantan. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 2(2), 234–246.

Dewi, A. T. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta)*. 1–23.

Ginting, E. M., Pulungan, F. A., Mujasmara, F. D., Panggabean, R. T. T., Maipita, I., & Rinaldi, M. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 797–806.

Gulo, H., Fitrawaty, F., & Arwansyah, A. (2023). Analisis pengaruh dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(1), 59–73.

Hanantoko, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur

- Tahun 2014-2018. *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 17.
- Harefa, S.E., M.E., M. (2019). Pengaruh Kebijakan Dana Bagi Hasil Terhadap Penerimaan Daerah Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 9(2), 147–160.
- Herlambang Febriyanto. (2022). Pengaruh Dau, Dak Fisik Dan Pad Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Provinsi Kalimantan Barat. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 7(3), 145–155.
- Husaini, A., & Lestari, S. (2019). Studi kasus tentang siswa yang kesulitan bersosialisasi dengan teman sebaya. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 8(3), 1–8.
- Hutagaol, A., Suhariato, J., Damanik, S. R., & Aritonang, K. B. (2024). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Utara 2010-2021. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(1), 126–136.
- Ifa, S. H., Pratama, R., & Arwanto, B. (2022). Kebijakan Uu No 1 Tahun 2022 Mengenai Perimbangan Keuangan Antar Pusat Dan Daerah Pasca Reformasi. *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 121–137.
- Ika, A. (2022). Kebijakan Dana Bagi Hasil. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik (JEKP)*, 9(1), 51–60. doi: 10.33701/jekp.v9i1.2787
- Lestari, P., Sarfiah, S. N., & Prasetyanto, P. K. (2019). Analisis Pengaruh DAU, DAK, Dan DBH Terhadap IPM di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tahun

- 2012-2016. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 1(1), 100–113.
<https://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/article/view/447>
- MUH.SURIADI. (2019). *PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN WAJO*. 1–23.
- Nany, M., Pratama, D. B., Prasetyaningrum, M., & Kusumaningsih, A. U. (2022). Pengaruh Pad, Dbh, Dau, Dak Dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 22(3), 247–261.
- Nikko Rahmat Saputro, Dr. Banu Witono, S.E., M.Si., Ak., C. (2020). *PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA*. 2507(February), 1–9.
- Nurkholis, A. (2020). TEORI PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Centered Development Theory. *INA-Rxiv 8trv7, Center for Open Science*, 3–5.
- Nurkodri, M. S., Amir, A., & Zamzami. (2023). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 11(1), 29–38.
- Paulus Yudi Hermawan, Harin Tiawon, & Sunaryo Neneng. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Tengah.

- Journal of Environment and Management*, 2(3), 242–248.
- Putri, H. P., & Ichsan, I. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 6(2), 1.
- Rizkiyah, J., & Anitasari, H. (2023). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, 6(1), 1–6.
- Rochdi, N. (2021). Ulasan Konsep Pembangunan Manusia Yang di Kembangkan Oleh United Nations development programme. *ITU News*, 5, 22–23.
- Rusydi, B. U., Maulia, C. N., & Hasbiullah, H. (2022). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 2(2), 97–110.
- Saputra, H., Abdiska, D., Ilham, M., & Kamarni, N. (2023). Dampak Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2022. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 1522–1535.
- Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2, 51–64.

- Saswatata, S. S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Semarang. *Serat Acitya- Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 11(1), 17–28.
- Siburian, M. T., Abdullah, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011—2018. *Tirtayasa Ekonomika*, 16(1), 1.
- Sugiyanto, H. S., & Musfirati, A. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 5(1), 20–36.
- Sultan, Rahayu, H. C., & Purwiyanta. (2023). Analisis Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, 75–83.
- Syafira, L., Harefa, K., Hidayat, O. S., & Habibi, M. R. (2022). Analisis PAD, DAU, DAK, DBH dan Belanja Modal serta pengaruhnya Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya*, 8(1), 80–89.
- Tuasela, A. (2023). Systematic Literature Review: Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 392–398.
- Tumbuan, C. C. ., Rorong, I. P. F., & Tumangkeng, S. Y. . (2023). Pengaruh

- Belanja Modal, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(04), 191–202.
- Widia Sofyan, V. R. (2023). Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 9(1), 221–227.
- Widyastuti, Y. (2020). *Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pendidikan Dan Teknologi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. 1–16.